

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 1997/1998 merupakan tahun yang terberat dalam tiga puluh tahun pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Diawali oleh krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Sejak itu, kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi kritis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan dan ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap sektor luar negeri. Krisis tersebut berkembang semakin parah karena terdapatnya berbagai kelemahan mendasar di dalam perekonomian nasional terutama di tingkat mikro. Bersamaan dengan itu, pengelolaan perekonomian dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh menyebabkan gejolak nilai tukar berubah menjadi krisis utang swasta dan krisis perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menempuh berbagai upaya mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Oleh karena itu, dibentuk dasar hukum Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut www.infobanknews.com yang dimuat pada Rabu 3 April 2013, sejak LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) berdiri, pada tahun 2005 terdapat 47 BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang dilikuidasi hingga akhir tahun 2012, faktor penyebabnya sebagian besar karena terjadi kesalahan dalam pengelolaan bank. Sejumlah tantangan kembali menghambat langkah BPR, kompetisi yang semakin

ketat di industri perbankan nasional membuat posisi BPR sedikit terhambat. Persaingan paling ketat bukan terjadi antara BPR versus BPR, melainkan BPR versus bank umum, terutama bank raksasa. Sebab, sebagian bank papan atas sudah masuk ke arena bisnis mikro yang selama ini menghidupi BPR.

Selain masalah kompetisi, regulator berencana mewajibkan bank-bank mengumumkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk kredit mikro, termasuk di BPR. Begitu pula dengan pemberlakuan izin berjenjang atau *multiple license* untuk ekspansi kantor berdasarkan modal, jika hal tersebut diberlakukan akan membuat langkah BPR semakin terbatas.

Menurut catatan Biro Riset Infobank yang dikutip dalam www.infobanknews.com yang dimuat pada Rabu 3 April 2013, selama ini tidak ada bank umum maupun BPR yang kolaps atau bangkrut karena kompetisi atau ketatnya persaingan di industri perbankan. Bank-bank yang dilikuidasi sebenarnya disebabkan salah kelola dan *moral hazard* pemilik maupun pengurusnya. Meski demikian, di tengah sejumlah tantangan yang ada, banyak bankir BPR tetap optimistis. Pasalnya, pasar masih menyediakan ruang bagi BPR dan penetrasi pasar perbankan Indonesia masih sangat dangkal. Dengan demikian, seharusnya BPR tidak perlu ragu menambah permodalan untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, yang paling utama bagi BPR adalah keseriusan dan komitmen pengurus maupun pemilik dalam mengelola usahanya.

Ketika kondisi perekonomian Indonesia yang semakin baik, maka semakin berkembang pula pertumbuhan BPR di berbagai daerah. Salah satunya adalah PT BPR Wilis Putra Utama Banyuwangi, yaitu lembaga keuangan bank yang

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR di daerah kota Banyuwangi. Dalam hal ini PT BPR Wilis Putra Utama didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta memiliki peranan penting yaitu menjadi sumber penyedia dana. Penyediaan dana yang diberikan oleh PT BPR Wilis Putra Utama kepada masyarakat berupa pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit. Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bagi sebuah bank pemberian kredit kepada nasabah merupakan sumber pendapatan atau keuntungan yang terbesar. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan setiap perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya dan menjaga kelangsungan hidupnya, maka pemberian kredit merupakan hal yang pasti secara terus menerus akan dilakukan oleh bank. Pendapatan terbesar bagi bank perkreditan rakyat adalah berasal dari bunga kredit yang diberikan. Namun demikian pemberian kredit ini memiliki faktor resiko yang cukup tinggi, dan berpengaruh cukup besar pula terhadap tingkat kesehatan Bank. Pihak bank selalu dihadapkan pada resiko yang cukup besar apakah dana dan bunga dari kredit yang diberikan akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam ikatan perjanjian kredit.

Agar kegiatan pemberian kredit di PT BPR Wilis Putra Utama Banyuwangi dapat berjalan dengan lancar, diperlukan adanya sistem akuntansi pemberian kredit yang akan mengatur mekanisme pemberian kredit kepada nasabah,

terutama pada salah satu bidang usaha yang bergerak pada simpan pinjam. Sistem akuntansi pemberian kredit adalah suatu sistem yang terdiri dari sekelompok unsur yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga sistem tersebut dapat digunakan untuk mengelola data yang berhubungan dengan usaha-usaha suatu perusahaan, menyebabkan terjadinya peristiwa pemberian kredit yang meliputi prosedur, dokumen, pencatatan dan bagian yang terkait dengan tujuan menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan pihak lain yang berkementingan. Dengan adanya sistem akuntansi pemberian kredit tersebut maka pembayaran kredit dilakukan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini sistem akuntansi pemberian kredit perlu diteliti untuk mengetahui apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi resiko kredit, serta kredit yang diberikan debitur akan kembali pada bank dengan lancar sesuai perjanjian kredit.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pemberian kredit pun sangat penting dalam penyediaan informasi bagi para pemakai informasi akuntansi, baik pihak ekstern maupun intern. Pihak ekstern menerima dan bergantung pada beragam keluaran dari SIA suatu BPR, biasanya keluaran ini bersifat rutin. Pihak intern memiliki kebutuhan informasi yang bervariasi tergantung pada tingkatan di dalam BPR dan fungsi yang dijalankannya. SIA mengikhtisarkan dan menyaring data yang tersedia bagi para pengambilan keputusan. Dalam hal ini, SIA mempengaruhi keputusan-keputusan kredit oleh manajer tingkat bawah, menengah, dan atas dalam pemberian kredit bagi calon nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut dan pentingnya sistem akuntansi pemberian kredit bagi perkembangan sektor kredit pada BPR, maka untuk membuat karya tulis yang berbentuk Tugas Akhir ini diberi judul “**SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT DI PT BPR WILIS PUTRA UTAMA BANYUWANGI**” .

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul Tugas Akhir ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Sistem Informasi Akuntansi** merupakan suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial serta pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern.
- b) **Pemberian Kredit** adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh BPR. Definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- c) **PT BPR Wilis Putra Utama** adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha di daerah kota Banyuwangi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan Tugas Akhir ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi pemberian kredit di PT BPR Wilis Putra Utama Banyuwangi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem informasi akuntansi pemberian kredit di PT BPR Wilis Putra Utama Banyuwangi.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi pemberian kredit terutama sistem yang digunakan oleh PT BPR Wilis Putra Utama Banyuwangi.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak lain atau pembaca, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, serta tertarik pada masalah yang diteliti oleh penulis untuk kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut.

c) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dan analisis terhadap sistem informasi akuntansi dalam perkreditan dapat digunakan sebagai suatu masukan yang dijadikan bahan pertimbangan manajemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam pengendalian pemberian kredit dan memperbaiki sistem yang telah diterapkan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan maka ruang lingkup pembahasan hanya pada sistem informasi akuntansi pemberian kredit pada PT BPR Wilis Putra Utama Banyuwangi.

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a) Interview

Yaitu, suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab dengan Lisa Prawitasari, SE di bagian Administrasi Kredit dalam PT BPR Wilis Putra Utama Banyuwangi.

b) Observasi

Yaitu, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti yaitu bagian yang berhubungan dengan perkreditan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dengan membaca, literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.